BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Pemerintah pada semua tingkatan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota) di Indonesia kini telah semakin aktif dalam pengembangan tentang sebuah kebijakan publik. Banyak kebijakan yang dihasilkan dan dilembarkan oleh badan legislatif baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah. Sangat penting untuk memahami makna dari kebijakan publik. Kita tidak dapat mengatakan suatu kebijakan kurang tepat apabila kita tidak mengetahui apa makna dan definisi dari sebuah kebijakan.

William Dunn menyebutkan istilah kebijakan adalah :

> "Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah". (Dunn, 2003 : 132)

Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu *A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals an theme an for achieving those goals* (Nakamura, 1980 : 31)

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakanserangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan :

1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya
3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

(Kartasasmita dalam Widodo, 2001 : 189)

Berdasarkan pendapat di atas, didalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Maka permasalahan-permasalahan tersebut mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui pengaruh dan berdampak apa bagi masyarakat, apakah akan memberikan pengaruh dan dampak yang baik apa yang buruk. Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi, mengemukakan pengertian kebijakan adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa dalam ketatanegaraan (THaib, 2001 : 77)

Harold Laswell berpendapat kebijakan adalah :

“Tugas intelektual pembuat keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, serta penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.” (Laswell dan Safie, 1992 : 35)

Menurut pendapat di atas kebijakan diartikan sebagai tugas intelektual pembuat keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian

kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kebijakan di masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan *(policy)* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000 : 56)

Berdasarkan pendapat di atas kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil atau dibuat oleh pelaku atau kelompok politik dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam membuat dan mengambil keputusan berusaha untuk memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Anderson mengartikan kebijakan public sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku dan sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2001 : 190)

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan public merupakan tindakan-tindakan yang telah diputuskan dan keputusan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Anderson mengemukakan terdapat elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, elemen tersebut antara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa *(otoritatif)*

(Anderson dalam Widodo, 2001 : 190)

Berdasarkan pendapat di atas kebijakan publik merupakan sekumpulan aturan yang berisikan tindakan dan pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik jika berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa, maka kebijakan tersebut akan bersifat positif jika pemerintah menanggapi permasalahan dan akan bersifat negatif jika keputusan pejabat tidak menanggapi atau tidak melakukan tindakan suatu masalah.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah diputuskan dan dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkann tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Steward Jr. Mereka mengungkapkan bahwa :

> "Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil *(output)*. Keberhasilan suatu implementasi sebagai suatu proses dan pencapaian tujuan hasil akhir *(output)*, yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih." (Lester dan Steward, dalam Agustino, 2006 : 139)

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi merupakan suatu proses dan hasil dari suatu tujuan. Dalam proses dan hasil akhir tersebut bisa terlihat tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Dunn mengistilahkan implementasi secara khusus, menyebutnya dengan implementasi kebijakan. Menurutnya implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. (Dunn, 2003 : 132)

Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Dwijowijoto mengemukakan bahwa :

> "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut." (Dwijowijoto, 2004 : 158)

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mendapat tujuan. Diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan public yang dimaksud yaitu proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Mazmanian dan Sabatier lebih lanjut menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa :

> "Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ini di atas, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukstur/ mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh

> kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut." (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, 2001 : 193)

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut, implementasi merupakan pelaksanan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan pengadilan, keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu diperlukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2001 : 194)

Persiapan proses implementasi kebijakan yang baik dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, oleh sebab itu dapat mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, dan menginterpretasikan kebijakan. Program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik dan menyediakan layanan suatu manfaat pada publik.

Sejalan dengan pengertian di atas, Budi Winarno dalam menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

> "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan." (Winarno, 2005 : 101)

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran *(output)* maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut di antaranya :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya – jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumberdaya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, baik itu terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu
3. Karakteristik Agen Pelaksana
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Kinerja implementasi kebijakan, publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri antara lain, kejujuran, bertanggungjawab, dan demokratis. Ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap/ Kecenderungan *(Disposition)* para pelaksana
   Sikap merupakan hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap dari para agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik kkordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
   Guna menilai kinerja perspektif sejauhmana lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

(dalam Agustino, 2006 : 142 – 144)

Menurut penjelasan di atas bahwa terdapat enam indicator yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dimana dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data yaitu : Ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan pemutakhiran data kependudukan di Kota Bandung tahun 2007 adalah mendukung tertib adminsitrasi kependudukan guna penertiban kepemilikan dokumen penduduk dan identitas kependudukan. Sumber daya yang terdiri dari sumberdaya manusia finansial/ dana, dan sumberdaya waktu. Karakteristik/ciri-ciri dari pelaksana berupa kejujuran, bertanggungjawab, dan demokratis dalam menerima ide, gagasan, dan pendapat dari masyarakat mengenai ketidakpuasan pelayanan yang diberikan. Struktur birokrasi, norma-norma, pola hubungan antar birokrasi sangat diperlukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam menyampaikan informasi, informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan terbuka tanpa ada yang rahasiakan demi kelancaran pelayanan yang akan diberikan. Faktor lain yang mepengaruhi adalah dukungan dari lingkungan eksternal yang berupa modal, dukungan masyarakat, dan para elite politik.

2.3 Demografi Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan, jumlah pendatang akan menambah dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Methors dan Sirks membedakan masalah penduduk menjadi dua yaitu : yang bersifat kuantitatif (demografi) dan kualitatif yang membahas masalah penduduk dari segi genetis dan biologis. (Methors dan Sirks, 2007 : 3).

Berdasarkan pendapat di atas, permasalahan penduduk dapat dihitung berdasarkan angka-angka yaitu dengan berdasarkan ilmu demografi dan permasalahan penduduk juga dapat dilihat dari segi genetis dan biologis yaitu berdasarkan turunan dan bentuk tubuh.

Donald J. Bogue mendefinisikan demografi sebagai berikut :

> "Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komonen demografi, yaitu kelahiran *(fertilitas)*, kematian *(mortalitas)*, perkawinan dan migrasi, dan mobilitas sosial." (Bogue dalam Yasin, 2007 : 1)

Berdasarkan definisi di atas demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kematian kelahiran perpindahan penduduk dan pergerakan antara satu

kelompok dengan kelompok lain. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pengertian dari penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006 : 3)

Haryo Nurdin berpendapat dalam demografi ada tiga fenomena yang merupakan bagian penting daripada penduduk, yaitu :

1. Dinamika Kependudukan
2. Komposisi Penduduk
3. Besar dan Persebaran Penduduk

(Nurdin, 2007 : 19)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa struktur dan persebaran akan membahas tentang komposis penduduk dan persebaran penduduk dan penduduk dapat dibagi dalam berbagai cirri atau karakteristik tertentu, baik sosial ekonomi maupun geografis.

2.3.1 Klasifikasi Penduduk

Harto Nurdin juga berpendapat bahwa terdapat pengelompokkan penduduk untuk berbagai tujuan dan maksud seperti :

1. Untuk mengetahui *Human Resources* yang baik menurut umur maupun jenis kelamin
2. Untuk mengambil suatu kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan
3. Untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk yang lain
4. Melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui ‘proses demografi’ yang telah terjadi pada penduduk tersebut.
   (Nurdin, 2007 : 19)

Menurut pendapat di atas, terdapat pengelompokkan penduduk yang berdasarkan maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamim, kebijakan yang berhubungan dengan penduduk yaitu bagaimana mengatur mengenai permasalahan kehidupan mereka, dan untuk mengetahui kehidupan penduduk yang satu dengan yang lainnya serta bagaimana mereka bersosialisasi. Untuk mengetahui pengelompokkan penduduk terdapat beberapa sumber-sumber data penduduk. Menurut Nizam A. Yunus dalam proses pengumpulan data, maka sumber data penduduk dapat dikelompokkan atas tiga pengelompokkan besar, yaitu :

1. Sensus
2. Survei
3. Registrasi

(Yunus, 2007 : 44)

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa definisi dari sensus adalah :

> "Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan *(collecting)*, menghimpun dan menyusun *(compilling)*, dan menertibkan data-data demografi, ekonomi dan social yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. "(PBB, 2007 : 45)

Melihat pendapat di atas, sensus merupakan suatu proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, dan menertibkan data-data penduduk yang dimana semua penduduk atau orang yang tinggal dalam suatu wilayah haruslah terdata keseluruhannya baik itu dari segi demografi, ekonomi, dan sosialnya. Di dalam proses pengumpulan data penduduk, daerah akan melihat bagaimana kehidupan ekonomi, sosial penduduk yang ada didaerahnya. Maka setelah daerah melihat

keadaan penduduk yang tinggal dilingkungannya, daerah akan membuat kebijaksanaan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan penduduknya.

Nizam A. Yunus memberi pengertian yang dimaksud dengan survey adalah :

> "Survei disini adalah survey yang cakupannya nasional (seperti halnya sensus). Dalam hal tahapan kerja dan keterangan apa yang dikumpulkan, pada dasarnya survey tidak berbeda dengan sensus. Hal ini membedakan survey dengan sensus yang terpenting adalah cakupan penduduk yang dicacah. Bila sensus mencacah seluruh penduduk maka survey hanya mencacah sebagian penduduk." (Yunus, 2007 : 46)

Menurut pengertian dari Nizam A. Yunus di atas, survey di sini adalah menyangkut survey nasional. Dalam tahapan kerja dan keterangan survey sama dengan sensus yaitu mencacah penduduk. Sedangkan yang membedakannya antara survey dan sesnsus adalah fleksibilitasnya. Survey dapat diadakan kapan saja tidak hanya memenuhi persyaratan periodik seperti halnya sensus. Dalam hal materi yang dikumpulkan, survey hanya mencacah sebagian penduduk dan sensus mencacah seluruh penduduk.

Menurut Nizam A. Yunus yang dimaksud dengan registrasi ialah :

> "Kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai mati. Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak (adopsi) dan perpindahan (migrasi). Karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital." (Yunus, 2007 : 47)

Berdasarkan pendapat di atas, registrasi merupakan sebuah kumpulan mengenai keterangan peristiwa-peristiwa dari segala kejadian yang merubah status sipil seseorang. Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah perkawinan,

perceraian, pengangkatan anak (adopsi) dan perpindahan (migrasi). Mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital.

2.3.2 Kebijaksanaan Kependudukan

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa pengertian dari kebijaksanaan kependudukan yaitu :

> "….. langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujun ekonomi sosial, dan demografi dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya…."(PBB, 2007 : 261)

Berdasarkan pengertian di atas, daerah akan membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan penduduknya yaitu dengan membuat langkah-langkah dan program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan penduduknya.

Menurut Kartomo Wirosuharjo berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh GBHN bagian dari kebijaksanaan kependudukan yang meliputi :

1) Bidang-bidang pengendalian kelahiran
2) Perumusan tingkat kematian terutama kematian anak-anak
3) Perpanjangan harapan hidup
4) Penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang
5) Pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata
6) Perkembangan dan penyebaran angkatan kerja

(Wirosuharjo, 2007 : 269)

Diambil dari kesimpulan pendapat di atas, kebijaksanaan kependudukan yang utama adalah kebijaksanaan Keluarga Berencana (KB). Kebijaksanaan mengenai KB ini sudah luas diketahui oleh semua petugas KB maupun oleh

masyarakat. Tujuan dari program KB adalah ingin menekan angka kelahiran sehingga dapat menurunkan tingkat kematian terutama kematian anak-anak dan penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang.

2.4 Pemutakhiran Data

Siklus hidup sistem terdiri dari lima tahap, empat tahap yang pertama, yakni perencanaan, analisis, rancangan, dan penerapan dimaksudkan bagi pengembangnya. Tahap kelima adalah tahap pengembang sistem dimaksudkan untuk penggunannya. Tapap penggunaan sistem terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut :

1. Menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan
2. Audit sistem untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja
3. Memelihara sistem sehingga sistem tersebut memberikan dukungan yang diperlukan. Pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk tiga alasan, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, meningkatkan sistem.

(Hariningsih, 2005 : 85)

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian *(event)* yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Hariningsih, 2005 : 69)

Menurut Robert A Leitch dan K. Roscoe Davis definisi dari sistem informasi sebagai berikut :

> "Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan." (Yogiyanto, 1989 : 11)

Menurut pendapat di atas, sistem informasi merupakan sistem yang mempertemukan kebutuhan transaksi di dalam sebuah organisasi, guna mendukung operasi/ pelayanan dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang ditentukan.

Berdasarkan kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan Kota Bandung pengertian dari dokumen kependudukan adalah :

> "Dokumen resmi yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan oleh pelayanan pendafatran penduduk dan pencatatan sipil." (Disduk Kota Bandung, 2007 : 3)

Menurut pengertian di atas, dokumen kependudukan merupakan suatu dokumen resmi yang dibuat atau dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan. Dokumen kependudukan di buat berdasarkan dari hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran dan pencatatan sipil.

Berdasarkan kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan Kota Bandung pengertian dari pendaftaran kependudukan yaitu :

> "Pendaftaran kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan." (Disduk Kota Bandung, 2007 : 4)

Pengertian pendaftaran kependudukan berdasarkan pendapat di atas, pendaftaran kependudukan merupakan suatu pencatatan biodata mengenai peristiwa kependudukan seperti, kelahiran, kematian, perkawinan dan peristiwa

kependudukan lainnya serta pendataan penduduk untuk memenuhi administrasi kependudukan. Salah satu tujuan dari pendaftaran kependudukan adalah untuk penertiban dokumen berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Berdasarkan kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan Kota Bandung pengertian dari peristiwa kependudukan yaitu :

> "Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap." (Disduk Kota Bandung, 2007 : 4)

Pengertian dari peristiwa kependudukan berdasarkan pendapat di atas, merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan kepada karena akan memberikan pengaruh kepada perubahan surat identitas penduduk surat keterangan mengenai perpindahan penduduk dan penduduk pendatang dari suatu daerah ke daerah lain.

Berdasarkan kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan Kota Bandung pengertian dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah :

"Sistem informasi administrasi kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan." (Disduk Kota Bandung, 2007 : 4)

Pengertian sistem informasi administrasi kependudukan di atas, merupakan pengolahan data kependudukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi untuk pengelolaan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Kependudukan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pengelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumus kebijakan dan pembangunan pada umumnya
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 2006 : 7)

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah ingin memberikan keabsahan data atau identitas penduduk agar dapat kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak status penduduk, tertib administrasi, dan menyediakan data penduduk untuk setiap program-program atau penyelenggaraan setiap kegiatan dari pemerintah serta menyediakan data dan informasi dengan menggunakan sistem komputerisasi sehingga data dari hasil pendaftaran dan pencatatan dapat diolah dengan cepat, mudah, mutakhir dan mudah diakses. Pemerintah Kota Bandungf membuat suatu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung yaitu Pemutakhiran data Kependudukan.

2.5 Pemutakhiran Data Kependudukan

Berdasarkan kerangka acuan kerja Dinas Kependudukan Kota Bandung difinisi dari pemutakhiran data kependudukan adalah :

> "Pemutakhiran Data Kependudukan adalah pengelolaan dan penyajian data penduduk melalui rangkaian kegiatan yaitu dengan melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data penduduk terkini lalu dicatat ke dalam *database* penduduk, dengan menggunakan computer sebagai alat abntu, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil." (Disduk Kota Bandung, 2007 : 4)

Berdasarkan difinisi di atas, pemutakhiran data kependudukan merupakan suatu pengelolaan dan penyajian data penduduk melalui suatu rangkaian yaitu dengan pencocokan dan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data penduduk dengan dicatat ke dalam *database* penduduk dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Menurut Dinas Kependudukan Kota Bandung terdapat beberapa data yang dimutakhirkan adalah :

1. Perubahan Alamat Lengkap (termasuk RT dan RW)
2. Perubahan Nama Lengkap
3. Perubahan Data Kelahiran (tempat dan tanggal lahir)
4. Perubahan Golongan Darah
5. Perubahan Status Perkawinan
6. Perubahan Status Hubungan dalam Rumah Tangga (SHDRT)
7. Perubahan Pendidikan
8. Perubahan Pekerjaan
9. Perubahan Biodata lainnya.
   (Disduk Kota Bandung, 2007 : 6)

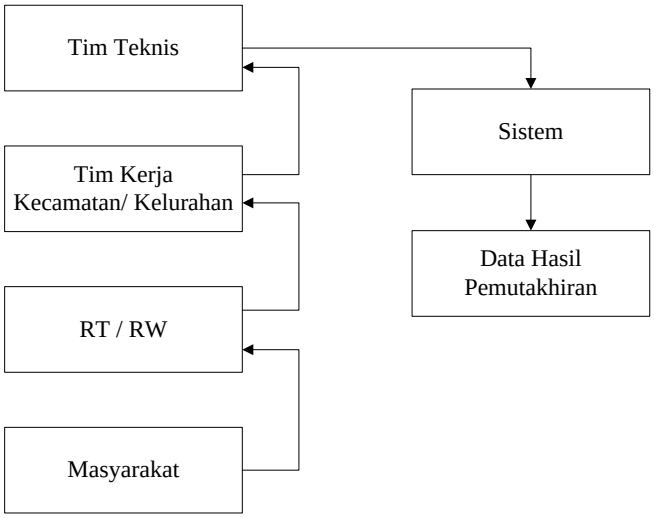
Sedangkan data yang harus dipersiapkan oleh masyarakat adalah :

1. Kartu Keluarga (fotocopy dilampirkan)
2. Akta Nikah
3. Keterangan Kematian/ Akta Kematian
4. Ijazah

Sebagai dokumen kependudukan pendukung dan pembandingan bahan pemutakhiran data kependudukan.
(www.disduk.bandung.go.id)

Dinas Kependudukan Kota Bandung menjelaskan bahwa di dalam proses pelaksanaan Pemutakhiran data kependudukan ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pemutakhiran data kependudukan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bagan 2.1
Mekanisme Pemutakhiran Data Kependudukan



Sumber : Dinas Kependudukan Kota Bandung Tahun 2007

Berdasarkan bagan di atas, maka proses dimulai dari tim teknis sebagai pelaksana teknis pemutakhiran data kependudukan berkoordinasi dengan tim kerja kecamatan/ kelurahan, lalu tim kerja kecamatan/ kelurahan melakukan koordinasi kepada RT/RW, selanjutnya RT/RW mendata dan mencatat dokumen penduduk. Yang harus masyarakat lakukan adalah menerima petugas pelaksana dan menyiapkan beberapa dokumen. Setalah data yang didapat dari masyarakat RT/RW memberikan laporan kepada tim kerja kecamatan/kelurahan dan tim kerja kecamatan memberi laporan kepada tim teknis. Setelah data yang didapat di lapangan tim teknis akan melakukan *entry* data dan mengolahnya menjadi sebuah sistem kemudian sistem tersebut menghasilkan data yang dimutakhirkan.